

KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PADA BERBAGAI TIPE DESA

Bambang Irawan dan Sri Hastuti Suhartini

PENDAHULUAN

Kelembagaan memiliki pengertian yang sangat luas. Kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan main yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan transaksi dengan pihak lainnya (Hayami dan Ruttan, 1984; Binswanger dan Ruttan, 1978). Contoh kelembagaan yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah sistem pembayaran upah tenaga kerja dengan cara borongan, bawon, kedokan, atau sambatan pada transaksi pasar tenaga kerja pertanian. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai institusi, organisasi, atau jaringan organisasi yang dibentuk dengan tujuan tertentu (Pakpahan, 1989; Fowler, 1992; Uphoff, 1992). Dalam konteks agribisnis, makna kelembagaan yang termasuk kategori ini misalnya lembaga penyuluhan dan organisasi kelompok tani yang pembentukannya ditujukan untuk mempercepat proses alih teknologi pertanian kepada petani.

Agribisnis juga memiliki makna yang sangat luas. Agribisnis dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan usaha yang menghasilkan produk pertanian hingga dikonsumsi oleh konsumen (Beierlein, 1986; Downey dan Ericson, 1992; Cramer dan Jensen, 1994). Berdasarkan definisi tersebut maka agribisnis dapat mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, dan konsumsi produk pertanian yang dihasilkan petani. Di samping itu, agribisnis juga dapat mencakup kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadaan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani, transfer teknologi usaha tani kepada petani, dan penyediaan modal usaha tani bagi petani.

Kegiatan usaha pertanian yang dilakukan oleh petani tidak terlepas dari peranan kelembagaan agribisnis yang terdapat di daerah perdesaan. Kelembagaan agribisnis di perdesaan dapat meliputi kelembagaan sarana produksi pertanian, kelembagaan buruh tani, kelembagaan peralatan dan mesin pertanian, kelembagaan pemasaran hasil pertanian, kelembagaan permodalan, kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan. Seluruh lembaga agribisnis tersebut akan memengaruhi kegiatan usaha pertanian yang dilakukan petani melalui mekanisme yang berbeda. Kelembagaan sarana produksi akan memengaruhi keputusan petani untuk melakukan usaha komoditas pertanian tertentu melalui pengaruhnya terhadap kemudahan petani untuk mendapatkan sarana produksi yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga permodalan akan memengaruhi petani untuk mengusahakan komoditas pertanian tertentu melalui pengaruhnya terhadap kemudahan petani untuk mendapatkan pinjaman modal usaha tani. Sementara, kelembagaan penyuluhan dan kelompok tani akan memengaruhi proses adopsi teknologi usaha tani yang dilakukan petani.

Ketersediaan seluruh komponen kelembagaan agribisnis tersebut bersifat dinamis akibat investasi yang dilakukan pemerintah, perusahaan swasta maupun petani, terutama petani kaya. Begitu pula perilaku setiap lembaga agribisnis akan bervariasi menurut tipe desa dan bersifat dinamis akibat dinamika situasi pasar komoditas pertanian dan pasar input usaha tani. Misalnya, pada komoditas sayuran yang memiliki risiko harga relatif tinggi suku bunga pinjaman modal yang diberikan oleh lembaga permodalan kepada petani cenderung tinggi dibanding komoditas padi yang memiliki risiko harga relatif rendah. Begitu pula kelembagaan kedokan pada pasar tenaga kerja buruh tani umumnya lebih berkembang di perdesaan dengan kelangkaan tenaga kerja relatif tinggi, sebaliknya sistem upah harian lebih berkembang di perdesaan dengan kelangkaan tenaga kerja relatif rendah.

Pengaruh kebijakan pertanian dan dinamika pasar terhadap usaha pertanian yang dilakukan petani pada dasarnya terjadi melalui perilaku lembaga agribisnis tersebut di atas. Perilaku kelembagaan agribisnis yang tidak kondusif dapat mementahkan berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan harga padi dengan tujuan untuk melindungi harga padi yang diterima petani tidak akan efektif apabila kebijakan harga tersebut tidak diteruskan kepada petani oleh pedagang padi. Begitu pula kebijakan pengembangan inovasi teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian yang dilakukan petani tidak akan efektif apabila inovasi teknologi tersebut tidak diteruskan kepada petani oleh lembaga penyuluhan dan kelompok tani. Kebijakan di bidang permodalan juga tidak akan efektif apabila kebijakan tersebut tidak diteruskan oleh lembaga permodalan di perdesaan kepada petani.

Makalah ini mengungkapkan dinamika beberapa aspek kelembagaan agribisnis di daerah perdesaan dengan tipe desa yang berbeda. Kelembagaan agribisnis yang dianalisis difokuskan pada kelembagaan sarana produksi, kelembagaan permodalan, kelembagaan pemasaran hasil panen petani, kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan.

METODE ANALISIS

Data yang digunakan adalah data hasil survei Panel Petani Nasional (Patanas) yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Pada data Patanas desa contoh dibagi atas empat tipe desa, yaitu (a) desa lahan sawah berbasis komoditas padi (desa LS-padi); (b) desa lahan kering berbasis komoditas palawija (desa LK-palawija); (c) desa lahan kering berbasis komoditas sayuran (desa LK-sayuran); dan (d) desa lahan kering berbasis komoditas perkebunan (desa LK-perkebunan). Seluruh desa contoh tersebar di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Adapun jumlah rumah tangga contoh sekitar 30–40 rumah tangga per desa. Pengumpulan data dilakukan sebanyak dua kali dengan interval waktu tiga tahun selama periode 2007–2012. Pengumpulan data dilakukan pada desa contoh yang sama, rumah tangga contoh yang sama, dan pengukuran variabel yang dianalisis dilakukan dengan metode yang sama pula

sehingga dapat dilakukan analisis perubahan yang terjadi dalam jangka waktu tiga tahun.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menghitung frekuensi petani yang terlibat pada setiap aspek kelembagaan agribisnis yang dianalisis. Pada kelembagaan sarana produksi aspek yang dianalisis meliputi ketersediaan sarana produksi, cara pembelian sarana produksi, dan cara pembayaran sarana produksi yang dilakukan petani. Pada kelembagaan pemasaran hasil pertanian, analisis difokuskan pada cara penjualan hasil panen dan pola pemasaran hasil panen yang dilakukan petani. Analisis kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan difokuskan pada partisipasi petani pada organisasi kelompok tani, kegiatan penyuluhan, dan pemanfaatan sumber informasi teknologi, sedangkan analisis kelembagaan permodalan difokuskan pada perilaku petani dalam memanfaatkan modal pinjaman dan sumber pinjaman modal yang digunakan petani.

KELEMBAGAAN SARANA PRODUKSI

Kelembagaan sarana produksi pertanian dapat meliputi para pedagang benih/bibit, pedagang pupuk, pedagang pestisida/herbisida, dan pedagang input usaha tani lainnya. Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, pengembangan kelembagaan sarana produksi pertanian memiliki peranan penting karena akan memengaruhi kemudahan petani untuk mendapatkan sarana produksi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan sarana produksi pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi yang dibutuhkan, baik secara fisik maupun secara finansial agar petani mampu mengadakan input usaha tani sesuai dengan kebutuhannya.

Pengalaman pada masa Revolusi Hijau telah membuktikan pentingnya pengembangan kelembagaan input usaha tani untuk mendorong peningkatan produksi padi. Dengan dibangunnya industri pupuk dan pengaturan tata niaga pupuk maka pupuk semakin tersedia di tingkat petani dan petani semakin mudah memperoleh pupuk yang dibutuhkan. Dengan kata lain, aksesibilitas petani terhadap pupuk secara fisik semakin baik. Begitu pula dengan diberlakukannya subsidi harga pupuk maka petani secara finansial semakin mampu menyediakan pupuk yang dibutuhkan karena harga pupuk yang harus dibayar petani menjadi lebih murah dibanding harga pasar.

Di lokasi penelitian pupuk kimia (urea, TSP, dan sebagainya) yang dibutuhkan petani dapat dikatakan selalu tersedia. Hampir seluruh petani menyatakan hal tersebut (Tabel 1). Hal ini mengindikasikan bahwa secara fisik aksesibilitas petani terhadap pupuk kimia relatif baik. Akan tetapi, aksesibilitas tersebut sedikit lebih rendah di desa lahan kering berbasis komoditas perkebunan karena hanya sekitar 80% petani yang menyatakan bahwa pupuk yang dibutuhkan selalu tersedia, sedangkan pada tiga tipe desa lainnya lebih dari 90% petani yang menyatakan hal tersebut. Kecenderungan demikian juga terjadi untuk aksesibilitas petani terhadap benih unggul dan pestisida mengingat petani yang menyatakan

bahwa kedua jenis input tersebut selalu tersedia lebih sedikit pada petani komoditas perkebunan dibanding petani padi, palawija, dan sayuran.

Meskipun sebagian besar petani mengungkapkan bahwa sarana produksi yang dibutuhkan selalu tersedia, namun proporsi petani yang menyatakan hal tersebut mengalami penurunan pada benih/bibit unggul (turun 20,7%) dan insektisida/pestisida (turun 11,6%). Hal ini mengindikasikan bahwa secara fisik aksesibilitas petani terhadap benih/bibit unggul dan insektisida/pestisida cenderung turun, sedangkan terhadap pupuk kimia relatif tetap. Penurunan tersebut relatif besar pada desa lahan kering berbasis komoditas palawija (turun sebesar 32,7% dan 21,6%) dan desa lahan kering berbasis komoditas perkebunan (turun sebesar 22,9% dan 18,2%). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penurunan aksesibilitas petani terhadap benih/bibit unggul dan insektisida/pestisida terutama terjadi pada desa lahan kering berbasis palawija dan komoditas perkebunan.

Tabel 1. Petani yang Menyatakan Bahwa Input Usaha Tani yang Dibutuhkan Selalu Tersedia Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Benih/bibit unggul			Pupuk kimia			Insektisida/pestisida		
	T0	T1	P	T0	T1	P	T0	T1	P
Lahan sawah-padi	98,0	90,4	-7,6	92,0	90,4	-1,6	96,7	90,4	-6,3
Lahan kering-palawija	95,9	63,2	-32,7	92,1	90,6	-1,5	100,0	78,4	-21,6
Lahan kering-sayuran	97,5	77,7	-19,8	93,4	100,0	6,6	99,2	99,0	-0,2
Lahan kering-perkebunan	96,2	73,3	-22,9	81,9	80,2	-1,7	97,8	79,6	-18,2
Rata-rata	96,9	76,2	-20,7	89,9	90,3	0,4	98,4	86,9	-11,6

Keterangan:

T0 = Tahun awal penelitian T1 = Tahun akhir penelitian P = Perubahan

Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

Meskipun pupuk kimia selalu tersedia di tingkat desa, tidak seluruh petani mampu membeli sarana produksi tersebut secara tunai akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Secara keseluruhan terdapat 84% petani yang mampu membeli pupuk kimia secara tunai dan 16% petani sisanya terbiasa membeli pupuk dengan cara dibayar setelah panen (Tabel 2). Pada pembelian benih/bibit dan insektisida/herbisida relatif sedikit petani yang membeli dengan cara dibayar setelah panen (kurang dari 7% petani) karena kebutuhan biaya untuk kedua jenis sarana produksi tersebut relatif kecil. Namun, pada pupuk kimia cukup banyak petani yang membeli dengan cara dibayar setelah panen karena kebutuhan biaya pupuk relatif besar pada usaha tani komoditas pertanian.

Dalam interval waktu tiga tahun proporsi petani yang membeli pupuk kimia dengan cara dibayar setelah panen secara keseluruhan mengalami penurunan dari

16,0% petani menjadi 12,7% petani. Penurunan proporsi petani tersebut cukup besar pada petani padi sawah (15,3%) dan petani sayuran (8,7%). Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan modal petani padi dan petani sayuran semakin baik sehingga mereka semakin mampu membeli pupuk yang dibutuhkan secara tunai. Kondisi demikian dapat terjadi akibat meningkatnya harga padi dan sayuran akhir-akhir ini sehingga memberikan keuntungan usaha tani yang lebih besar bagi petani. Namun, pada petani perkebunan proporsi petani yang membeli pupuk dengan cara dibayar setelah panen justru naik sebesar 10,8% dan hal ini dapat terjadi akibat tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan sehingga harga pupuk di tingkat petani semakin mahal.

Tabel 2. Cara Pembelian Input Usaha Tani Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Benih/bibit			Pupuk anorganik			Pestisida/herbisida		
	T0	T1	P	T0	T1	P	T0	T1	P
Lahan sawah-padi									
a. Tunai	98,9	95,0	-3,9	79,7	95,0	15,3	91,4	95,0	3,6
b. Dibayar setelah panen	1,1	5,0	3,9	20,3	5,0	-15,3	8,6	5,0	-3,6
Lahan kering-palawija									
a. Tunai	99,6	86,2	-13,4	86,8	86,5	-0,3	98,8	88,3	-10,5
b. Dibayar setelah panen	0,4	13,8	13,4	13,2	13,5	0,3	1,2	11,7	10,5
Lahan kering-sayuran									
a. Tunai	98,3	94,2	-4,1	88,4	97,1	8,7	83,5	94,1	10,6
b. Dibayar setelah panen	1,7	5,8	4,1	11,6	2,9	-8,7	16,5	5,9	-10,6
Lahan kering-perkebunan									
a. Tunai	98,7	97,5	-1,2	81,3	70,5	-10,8	99,4	93,7	-5,7
b. Dibayar setelah panen	1,3	2,5	1,2	18,7	29,5	10,8	0,6	6,3	5,7
Rata-rata									
a. Tunai	98,9	93,2	-5,7	84,1	87,3	3,2	93,3	92,8	-0,5
b. Dibayar setelah panen	1,1	6,8	5,7	16,0	12,7	-3,2	6,7	7,2	0,5

Keterangan:

T0 = Tahun awal penelitian T1 = Tahun akhir penelitian P = Perubahan

Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

Pembelian input usaha tani (benih, pupuk, insektisida, dsb.) dengan cara dibayar setelah panen (yarnen) atau meminjam lebih dulu dari pedagang sebenarnya kurang menguntungkan bagi petani karena harga input yang harus dibayar petani menjadi lebih mahal. Secara umum, terdapat empat pola yang dilakukan pedagang input untuk mendapatkan harga jual input yang lebih menguntungkan dari petani yang membeli input dengan cara yarnen, yaitu (1) melakukan pertukaran antara input usaha tani yang dipinjamkan dengan produk pertanian yang dihasilkan petani dengan nilai pertukaran tertentu; (2) menetapkan

harga input usaha tani yang lebih mahal bagi petani yang membeli dengan cara yarmen dibanding petani yang membeli secara tunai; (3) petani diharuskan menjual hasil panennya kepada pedagang pemberi pinjaman dengan tujuan menguasai perdagangan komoditas yang dihasilkan petani; dan (4) nilai pinjaman input usaha tani dikenakan bunga pinjaman dalam jumlah tertentu.

Dari seluruh pola pembayaran pinjaman input usaha tani tersebut secara umum pola 2 yang paling banyak dilakukan (Tabel 3). Hal ini terutama dilakukan petani padi sawah dan petani komoditas perkebunan di mana lebih dari 60% petani yang membeli input usaha tani secara yarmen melakukan pembayaran dengan cara tersebut. Namun, pada petani sayuran cara pembayaran pola 4 yang paling dominan di mana nilai pinjaman input petani dikenakan suku bunga pinjaman dengan persentase tertentu. Hal ini dilakukan pedagang pemberi pinjaman karena harga komoditas sayuran sangat berfluktuasi sehingga pola pembayaran tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding pola lainnya.

Tabel 3. Cara Pembayaran Input Usaha Tani jika Dibayar setelah Panen Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Cara pembayaran ³⁾			
	1	2	3	4
Tahun awal ¹⁾				
1. Lahan sawah-padi	2,9	62,3	11,6	23,2
2. Lahan kering-palawija	-	48,5	30,3	21,2
3. Lahan kering-sayuran	-	30,8	19,2	50,0
4. Lahan kering-perkebunan	1,8	63,6	25,5	9,1
Rata-rata	2,4	51,3	21,7	25,9
Tahun akhir ²⁾				
1. Lahan sawah-padi	7,1	28,6	53,6	10,7
2. Lahan kering-palawija	8,2	34,4	24,6	32,8
3. Lahan kering-sayuran	7,1	28,6	50,0	14,3
4. Lahan kering-perkebunan	11,8	64,7	17,6	5,9
Rata-rata	8,6	39,1	36,5	15,9
Perubahan				
1. Lahan sawah-padi	4,2	-33,7	42,0	-12,5
2. Lahan kering-palawija	8,2	-14,1	-5,7	11,6
3. Lahan kering-sayuran	7,1	-2,2	30,8	-35,7
4. Lahan kering-perkebunan	10,0	1,1	-7,9	-3,2
Rata-rata	6,2	-12,2	14,8	-10,0

Keterangan:

¹⁾ Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

²⁾ Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

³⁾ Cara pembayaran:

1 = ditukar dengan hasil panen

2 = dibayar dengan uang, tetapi harganya lebih mahal dibanding harga yang dibayar tunai

3 = dibayar dengan uang, tetapi hasil panen harus dijual ke pedagang tersebut

4 = dibayar dengan uang, dan hasil panen boleh dijual ke siapa saja, tetapi nilai pinjaman sarana produksi dikenakan bunga

Dalam tiga tahun pola pembayaran pinjaman input usaha tani cenderung bergeser ke pola 3 (pinjaman dibayar dengan uang tetapi hasil panen harus dijual ke pedagang pemberi pinjaman). Hal ini terutama terjadi pada petani padi dan petani sayuran di mana lebih dari 50% petani peminjam input usaha tani melakukan pembayaran pinjamannya dengan cara tersebut. Pergeseran tersebut dapat disebabkan oleh naiknya harga padi dan sayuran akhir-akhir ini sehingga memberi peluang bagi pedagang padi dan sayuran untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Untuk meningkatkan total keuntungannya maka pedagang tersebut berusaha meningkatkan omset penjualannya dengan mengharuskan petani menjual hasil panennya kepada pedagang pemberi pinjaman. Pada komoditas perkebunan dan palawija kenaikan harga tersebut relatif kecil sehingga pola pembayaran pinjaman input usaha tani relatif tetap pada pola 2 (pinjaman input usaha tani dibayar dengan uang tetapi dengan harga lebih mahal dibanding harga tunai).

KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI DAN PENYULUHAN

Sering kali diungkapkan bahwa kunci keberhasilan upaya peningkatan produksi padi pada masa Revolusi Hijau adalah inovasi teknologi yang dikemas dalam "Panca Usaha Tani Padi" yang meliputi penggunaan varietas unggul padi, pupuk anorganik, insektisida/pestisida, dan perbaikan teknik budi daya tanaman padi, seperti pengaturan jarak tanam dan pengairan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa inovasi teknologi tersebut tidak mungkin berhasil jika tidak didukung dengan inovasi kelembagaan yang memungkinkan transfer teknologi secara cepat kepada para petani. Dalam kaitan ini terdapat dua inovasi kelembagaan yang berperan penting dalam mempercepat proses alih teknologi tersebut, yaitu pembentukan organisasi kelompok tani dan lembaga penyuluhan. Dalam konsep diseminasi teknologi yang dikemukakan oleh Mosher, lembaga penyuluhan merupakan bagian dari *delivery system* yang berfungsi menyalurkan inovasi teknologi kepada para penggunanya, sedangkan organisasi kelompok tani merupakan bagian dari *receiving system* atau sistem yang menerima dan menerapkan inovasi teknologi yang diperkenalkan.

Dalam konteks alih teknologi, Suradisastra (1992) mengemukakan bahwa proses diseminasi teknologi akan berjalan lebih mulus bila disertai dengan pemanfaatan potensi elemen-elemen kelembagaan dan status petani. Dalam kaitan ini kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan penyuluhan merupakan dua komponen lembaga agribisnis yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki peranan dalam proses alih teknologi kepada petani. Dibentuknya lembaga penyuluhan memungkinkan terjadinya penyaluran teknologi baru kepada para petani, sedangkan dibentuknya kelompok tani sebagai wahana penyuluhan memungkinkan terjadinya difusi teknologi secara lebih cepat akibat adanya *demonstration effect* (efek demonstrasi) di dalam kelompok tani. Dalam penyebaran teknologi usaha tani efek demonstrasi tersebut perlu diciptakan dan dikembangkan mengingat petani umumnya hanya akan menerapkan suatu teknologi baru setelah mereka melihat sendiri keunggulan dan manfaat penerapan teknologi tersebut.

Sekitar 75% petani mengetahui keberadaan kelompok tani tersebut (Tabel 4). Namun demikian, dari seluruh petani tersebut kurang dari 65% petani yang menjadi anggota kelompok tani, dengan kata lain tidak semua petani berminat untuk menjadi anggota kelompok tani. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya manfaat yang dapat diperoleh petani dengan menjadi anggota kelompok tani, terutama yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Hal tersebut dapat disimak dari persepsi petani yang sebagian besar (45,7%) mengungkapkan bahwa manfaat utama menjadi anggota kelompok tani adalah hanya tersedianya sarana untuk bertukar pikiran. Sementara, manfaat yang terkait dengan aktivitas ekonomi petani seperti meringankan pekerjaan, membantu akses terhadap kredit, dan tersedianya sarana keuangan hanya diungkapkan oleh sebagian kecil petani (6,7–21,4%).

Tabel 4. Petani Anggota Kelompok Tani dan Persepsi tentang Manfaat Menjadi Anggota Kelompok Tani Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Keberadaan kelompok tani	Petani anggota kelompok tani	Manfaat menjadi anggota kelompok tani ³⁾				
			1	2	3	4	5
Tahun awal ¹⁾							
1. Lahan sawah-padi	76,6	62,9	21,1	51,9	8,3	4,5	14,3
2. Lahan kering-palawija	80,2	76,4	9,5	71,4	1,6	0,0	17,5
3. Lahan kering-sayuran	80,2	58,7	20,0	40,0	7,5	12,5	20,0
4. Lahan kering-perkebunan	68,1	60,7	33,7	19,3	6,0	9,6	31,3
Rata-rata	76,3	64,7	20,5	45,7	5,9	6,7	21,4
Tahun akhir ²⁾							
1. Lahan sawah-padi	94,1	78,8	15,2	66,2	3,8	1,7	13,1
2. Lahan kering-palawija	72,6	52,3	6,7	66,7	8,0	12,0	6,7
3. Lahan kering-sayuran	72,9	48,7	24,2	36,4	0,0	21,2	18,2
4. Lahan kering-perkebunan	60,1	58,4	27,6	24,4	10,6	21,1	16,3
Rata-rata	74,9	59,6	18,4	48,4	5,6	14,0	13,6
Perubahan							
1. Lahan sawah-padi	17,5	15,9	-5,9	14,3	-4,5	-2,8	-1,2
2. Lahan kering-palawija	-7,6	-24,1	-2,8	-4,7	6,4	12,0	-10,8
3. Lahan kering-sayuran	-7,3	-10,0	4,2	-3,6	-7,5	8,7	-1,8
4. Lahan kering-perkebunan	-8,0	-2,3	-6,1	5,1	4,6	11,5	-15,0
Rata-rata	-1,4	-5,1	-2,1	2,7	-0,3	7,3	-7,8

Keterangan:

¹⁾ Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

²⁾ Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

³⁾ Manfaat menjadi anggota kelompok tani:

1 = meringankan pekerjaan (gotongroyong)

2 = sarana tukar pikiran

3 = sarana keuangan (tabungan/pinjaman, arisan, dsb.)

4 = membantu akses terhadap kredit

5 = lainnya

Dalam periode tiga tahun pemahaman petani tentang keberadaan kelompok tani relatif tetap, yaitu sekitar 75% petani. Proporsi petani yang menjadi anggota kelompok tani bahkan turun pada tipe desa lahan kering berbasis komoditas

palawija, sayuran, dan perkebunan sedangkan pada tipe desa sawah berbasis padi meningkat dari 62,9% petani menjadi 78,8% petani. Hal ini menunjukkan bahwa minat petani untuk menjadi anggota kelompok tani semakin lemah pada desa berbasis lahan kering, tetapi sebaliknya pada desa berbasis lahan sawah. Kecenderungan seperti ini dapat terjadi karena program-program pembangunan pertanian lebih diutamakan pada desa berbasis lahan sawah dan kesertaan sebagai anggota kelompok tani merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh bantuan fasilitas yang tercakup dalam program tersebut.

Dalam konteks diseminasi teknologi pertanian kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh PPL memiliki peran penting untuk mempercepat proses alih teknologi kepada petani. Tabel 5 memperlihatkan bahwa keterlibatan petani dalam aktivitas penyuluhan secara keseluruhan sebesar 55,1% petani dan dalam tiga tahun selanjutnya tidak mengalami perubahan yang signifikan (56,6% petani). Dengan kata lain, dinamika penyuluhan relatif stagnan. Begitu pula materi penyuluhan yang diberikan kepada petani tidak banyak mengalami perubahan dan cenderung terfokus pada aspek pengendalian hama terpadu. Keterlibatan petani yang relatif besar (lebih dari 70% petani) khususnya terjadi pada tipe desa sawah berbasis padi dan relatif rendah (kurang dari 55% petani) pada tipe desa lahan kering berbasis komoditas palawija, sayuran, dan perkebunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran penyuluhan hanya relatif tinggi di desa berbasis lahan sawah, tetapi lemah di desa berbasis lahan kering.

Pada masa Revolusi Hijau para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sering kali disebut sebagai “ujung tombak pembangunan pertanian” mengingat peranannya yang signifikan dalam mempercepat proses alih teknologi pertanian kepada petani. Pada masa tersebut kegiatan penyuluhan oleh PPL biasanya dilakukan dengan metode LAKU (Latihan dan Kunjungan kepada para petani) sehingga di daerah perdesaan para PPL sering kali berperan sebagai sumber informasi teknologi untuk mengatasi permasalahan budi daya tanaman yang dihadapi petani. Namun, akhir-akhir ini peran PPL sebagai sumber informasi teknologi pertanian relatif lemah. Tabel 6 memperlihatkan bahwa secara umum kurang dari 50% petani yang memanfaatkan PPL sebagai sumber informasi teknologi pertanian jika petani menghadapi masalah dengan kegiatan usaha tani yang mereka lakukan. Hal ini antara lain terjadi karena dalam melakukan penyuluhan metode kunjungan lapang semakin jarang dilakukan oleh PPL.

Sebagian besar petani (sekitar 90% petani) lebih mengandalkan sesama petani lain yang dinilai lebih berpengalaman sebagai sumber informasi teknologi apabila petani menghadapi masalah dengan kegiatan budi daya tanaman yang diusahakan. Sumber informasi teknologi lain yang cukup sering dimanfaatkan oleh petani adalah pedagang sarana produksi dan kelompok tani. Kondisi demikian dapat terjadi karena domisili sumber informasi teknologi tersebut cukup dekat dengan petani sehingga relatif mudah untuk mendapatkan informasi teknologi yang dibutuhkan. Hal ini sangat berbeda dengan petugas PPL yang tidak semuanya berdomisili di desa-desa yang merupakan wilayah binaannya.

Tabel 5. Partisipasi Petani pada Kegiatan Penyuluhan Pertanian Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Petani peserta penyuluhan	Materi penyuluhan ³⁾								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tahun awal ¹⁾										
1. Lahan sawah-padi	77,9	47,3	66,7	65,7	66,7	77,9	55,6	38,8	31,3	23,7
2. Lahan kering-palawija	50,7	7,5	50,7	37,7	50,0	40,0	47,1	19,1	17,6	29,5
3. Lahan kering-sayuran	54,3	19,4	29,0	26,7	35,5	54,3	25,8	19,4	21,9	4,2
4. Lahan kering-perkebunan	37,3	19,4	37,3	21,5	35,2	36,8	23,9	23,4	14,8	25,8
Rata-rata	55,1	23,4	45,9	37,9	46,9	52,3	38,1	25,2	21,4	20,8
Tahun akhir ²⁾										
1. Lahan sawah-padi	73,5	41,5	67,9	61,5	69,3	73,5	55,6	38,9	34,1	25,5
2. Lahan kering-palawija	56,6	18,6	50,0	54,2	0,0	56,6	0,0	25,4	29,3	27,1
3. Lahan kering-sayuran	47,0	13,3	33,3	35,9	0,0	47,0	0,0	12,7	18,8	4,8
4. Lahan kering-perkebunan	50,5	8,0	29,6	50,5	0,0	38,1	0,0	20,4	14,7	20,0
Rata-rata	56,9	20,4	45,2	50,5	17,3	53,8	13,9	24,4	24,2	19,4
Perubahan										
1. Lahan sawah-padi	-4,4	-5,8	1,2	-4,2	2,6	-4,4	0,0	0,1	2,8	1,8
2. Lahan kering-palawija	5,9	11,1	-0,7	16,5	-50,0	16,6	-47,1	6,3	11,7	-2,4
3. Lahan kering-sayuran	-7,3	-6,1	4,3	9,2	-35,5	-7,3	-25,8	-6,7	-3,1	0,6
4. Lahan kering-perkebunan	13,2	-11,4	-7,7	29,0	-35,2	1,3	-23,9	-3,0	-0,1	-5,8
Rata-rata	1,8	-3,0	-0,7	12,6	-29,6	1,5	-24,2	-0,8	2,8	-1,4

Keterangan:

¹⁾ Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

²⁾ Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

³⁾ Materi penyuluhan:

1 = penangkaran bibit

3 = pengaturan pola tanam

5 = pengendalian hama terpadu (PHT)

7 = penanganan pascapanen

9 = ketatalaksanaan organisasi kelompok tani

2 = pengenalan varietas unggul

4 = pemupukan berimbang

6 = pengaturan jarak tanam

8 = pembuatan pupuk organik

Tabel 6. Sumber Informasi Teknologi Usaha Tani yang Sering Dimanfaatkan Petani Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Sumber informasi teknologi usaha tani ³⁾					
	1	2	3	4	5	6
Tahun awal ¹⁾						
1. Lahan sawah-padi	48,8	90,8	29,7	31,9	59,2	21,2
2. Lahan kering-palawija	15,2	88,2	8,6	27,3	19,4	1,9
3. Lahan kering-sayuran	15,4	96,8	5,1	23,2	45,9	1,3
4. Lahan kering-perkebunan	15,2	89,1	7,0	26,2	11,9	6,1
Rata-rata	23,7	91,2	12,6	27,2	34,1	7,6
Tahun akhir ²⁾						
1. Lahan sawah-padi	51,4	93,3	25,7	51,3	36,5	2,9
2. Lahan kering-palawija	49,0	97,8	25,7	57,4	49,5	16,4
3. Lahan kering-sayuran	32,5	94,6	3,6	24,1	31,7	1,3
4. Lahan kering-perkebunan	26,9	90,1	13,2	29,8	21,4	7,8
Rata-rata	40,0	94,0	17,1	40,7	34,8	7,1
Perubahan						
1. Lahan sawah-padi	2,6	2,5	-4,0	19,4	-22,7	-18,3
2. Lahan kering-palawija	33,8	9,6	17,1	30,1	30,1	14,5
3. Lahan kering-sayuran	17,1	-2,2	-1,5	0,9	-14,2	0,0
4. Lahan kering-perkebunan	11,7	1,0	6,2	3,6	9,5	1,7
Rata-rata	16,3	2,8	4,5	13,5	0,7	-0,5

Keterangan:

¹⁾ Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

²⁾ Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

³⁾ Sumber informasi teknologi usaha tani:

1 = PPL

2 = sesama petani

3 = aparat desa

4 = kelompok tani

5 = pedagang sarana produksi

6 = pedagang hasil pertanian

KELEMBAGAAN PERMODALAN

Untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya petani membutuhkan berbagai jenis input usaha tani seperti tenaga kerja, benih, pupuk, insektisida, pestisida, dan herbisida. Sebagian dari kebutuhan input usaha tani tersebut dalam batas tertentu dapat disediakan oleh petani sendiri sehingga petani tidak harus mengeluarkan biaya untuk dapat memenuhi kebutuhan jenis input usaha tani tersebut. Misalnya, kebutuhan benih pada petani tertentu sering kali dipenuhi dari hasil produksi petani sendiri sehingga petani tidak selalu harus menyediakan modal untuk pembelian benih. Begitu pula untuk kegiatan pemupukan dan penyemprotan petani, biasanya tidak membutuhkan tenaga kerja upahan yang harus dibayar karena kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh petani sendiri dan anggota keluarganya. Kebutuhan biaya tunai untuk pembayaran ongkos tenaga kerja pada kedua jenis kegiatan tersebut biasanya hanya dilakukan apabila lahan garapan petani relatif luas, sedangkan tenaga kerja keluarga yang tersedia relatif sedikit.

Beberapa kegiatan usaha tani yang biasanya tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri dan harus menggunakan tenaga upahan adalah kegiatan pengolahan lahan, penanaman, dan panen. Petani umumnya harus mengeluarkan biaya pengolahan lahan karena kegiatan tersebut membutuhkan tenaga kerja cukup banyak sehingga biasanya dilakukan dengan tenaga traktor atau tenaga hewan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar petani. Sementara, kegiatan penanaman umumnya tidak dapat dilakukan oleh petani sendiri dan harus membayar tenaga upahan karena kegiatan tersebut harus dilakukan secara cepat untuk mengejar waktu tanam sesuai dengan jadwal pasokan air ke lahan petani. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan panen di mana petani umumnya harus menggunakan tenaga upahan akibat keterbatasan tenaga kerja keluarga yang tersedia, sedangkan kegiatan panen harus dilakukan secara serentak. Di samping untuk membiayai kebutuhan tenaga kerja seperti tersebut di atas petani juga harus menyediakan dana untuk pembelian input usaha tani yang tidak dapat diproduksi sendiri seperti pupuk urea, TSP, dan obat-obatan.

Di lokasi penelitian tidak seluruh petani selalu mampu menyediakan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan biaya usaha tani tersebut (biaya tenaga kerja dan input usaha tani yang harus dibeli) sehingga harus meminjam modal usaha tani dari pihak lain. Secara keseluruhan terdapat sekitar 10–39% petani yang terpaksa harus meminjam modal usaha tani dari pihak lain akibat keterbatasan modal tunai yang mereka miliki (Tabel 7). Jumlah petani yang melakukan pinjaman modal usaha tani tersebut relatif banyak di desa sawah berbasis komoditas padi dan di desa lahan kering berbasis sayuran. Namun, dalam periode waktu tiga tahun proporsi petani peminjam modal di desa sawah berbasis padi turun secara drastis dari 39,1% petani menjadi 15,5% petani. Begitu pula pada desa lahan kering berbasis sayuran terjadi penurunan yang cukup besar dari 25,6% petani menjadi 18,1% petani. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan modal petani padi sawah dan petani sayuran semakin baik dan kondisi demikian tidak terlepas dari naiknya harga kedua komoditas tersebut yang relatif pesat akhir-akhir ini.

Secara umum, peminjaman modal usaha tani yang dilakukan petani ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biaya pupuk. Pada tahun awal penelitian sebagian besar petani (68,8% petani) mengalokasikan modal pinjamannya untuk membeli pupuk dan hal ini dapat dipahami mengingat pupuk kimia (urea, TSP, dsb.) merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan usaha tani dan kebutuhan biaya pupuk relatif besar. Sebaliknya, petani yang mengalokasikan pinjaman modalnya untuk kebutuhan biaya benih/bibit relatif sedikit (5,8%) karena petani umumnya mampu menyediakan sendiri kebutuhan benihnya dari hasil produksi pada musim tanam sebelumnya. Begitu pula alokasi pinjaman modal untuk biaya tenaga kerja hanya dilakukan oleh sebagian kecil petani (11,9%) karena sebagian kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi dari tenaga kerja keluarga.

Dalam periode tiga tahun proporsi petani yang mengalokasikan pinjamannya untuk membeli pupuk turun drastis dari 68,8% petani menjadi 43,2% petani. Akan tetapi, proporsi petani yang mengalokasikan pinjamannya untuk membeli obat-obatan naik dari 13,5% petani menjadi 31,7% petani. Peningkatan proporsi petani yang mengalokasikan modal pinjamannya untuk

pembelian obat-obatan relatif besar pada petani perkebunan, padi, dan palawija. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan modal usaha tani untuk pembelian obat-obatan cenderung naik dan kondisi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya gangguan hama dan penyakit pada lahan garapan petani.

Tabel 7. Petani yang Meminjam Modal Usaha Tani dan Pemanfaatannya Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Petani peminjam modal	Pemanfaatan pinjaman modal			
		Tenaga kerja	Benih/bibit	Pupuk	Obat
Tahun awal ¹⁾					
1. Lahan sawah-padi	39,1	23,2	6,3	62,7	7,7
2. Lahan kering-palawija	11,0	8,3	0,0	91,7	0,0
3. Lahan kering-sayuran	25,6	5,9	14,7	41,2	38,2
4. Lahan kering-perkebunan	16,5	10,2	2,0	79,6	8,2
Rata-rata	23,1	11,9	5,8	68,8	13,5
Tahun akhir ²⁾					
1. Lahan sawah-padi	15,5	20,0	9,4	41,3	29,4
2. Lahan kering-palawija	10,8	5,3	15,8	63,2	15,8
3. Lahan kering-sayuran	18,1	12,1	15,2	27,3	45,5
4. Lahan kering-perkebunan	15,7	20,5	2,6	41,0	35,9
Rata-rata	15,0	14,5	10,8	43,2	31,7
Perubahan					
1. Lahan sawah-padi	-23,6	-3,2	3,1	-21,4	21,7
2. Lahan kering-palawija	-0,2	-3,0	15,8	-28,5	15,8
3. Lahan kering-sayuran	-7,5	6,2	0,5	-13,9	7,3
4. Lahan kering-perkebunan	-0,8	10,3	0,6	-38,6	27,7
Rata-rata	-8,1	2,6	5,0	-25,6	18,2

Keterangan:

¹⁾ Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

²⁾ Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

Untuk mengatasi keterbatasan modal petani maka pengembangan kelembagaan bank formal yang dapat menyalurkan pinjaman kepada petani dengan bunga cukup rendah merupakan upaya penting. Pemikiran seperti ini sebenarnya sudah lama muncul sehingga pada masa Revolusi Hijau pemerintah mengembangkan lembaga BRI-Unit Desa yang berlokasi di kecamatan-kecamatan agar secara fisik aksesibilitas petani kepada lembaga perbankan semakin baik. Untuk mendorong lembaga perbankan lebih melayani kebutuhan modal petani dan usaha kecil lainnya berbagai kebijakan juga telah dilakukan pemerintah yang diawali dengan diterbitkannya kebijakan Pakto 1983, Pakdes 1989, dan Pakjan 1990 yang pada intinya mempermudah proses pendirian lembaga bank agar petani dan pengusaha kecil dapat lebih mudah memperoleh pinjaman modal yang mereka butuhkan (Soentoro *et al.*, 1992). Akan tetapi, lembaga perbankan umumnya kurang tertarik untuk menyalurkan pinjaman modal kepada petani.

Menurut Kloppinger-Todd dan Sharma (2010), hal ini umumnya disebabkan oleh empat faktor, yaitu (1) rumah tangga pertanian berlokasi di daerah terpencil dan tersebar sehingga dari segi biaya pelayanan menjadi tidak efektif; (2) resiko usaha pertanian skala kecil akibat faktor iklim relatif tinggi sehingga lembaga perbankan sulit untuk mendapatkan asuransi kredit pertanian; (3) lembaga perbankan umumnya berlokasi di sekitar perkotaan dan kurang menjangkau daerah perdesaan; dan (4) sebagian besar petani di negara berkembang berlatar belakang pendidikan rendah dan tidak banyak mengetahui prosedur operasional lembaga perbankan.

Berbagai kebijakan lainnya juga telah diterbitkan termasuk kebijakan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Akhir-akhir ini Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan program PUAP yang secara substansi bertujuan untuk mendorong tumbuhnya LKM yang dikelola oleh gapoktan/kelompok tani. Pada program tersebut setiap gapoktan/kelompok tani yang dilibatkan menerima bantuan dana sebesar 100 juta rupiah sebagai modal awal dan seluruh desa lokasi penelitian dilibatkan dalam program PUAP yang dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga tahun 2014.

Tabel 8 memperlihatkan bahwa hanya sekitar 4–20% petani peminjam modal menurut tipe desa yang melakukan pinjamannya dari bank formal. Namun, perlu dicatat bahwa yang termasuk bank formal tersebut pada umumnya adalah BPR yang memberlakukan suku bunga relatif tinggi. Secara umum, sebagian besar petani melakukan pinjaman modal dari pedagang sarana produksi (35,0–48,2% petani peminjam modal menurut tipe desa). Hal ini dapat dipahami mengingat pinjaman modal yang dilakukan oleh petani sebagian besar ditujukan untuk pembelian pupuk sehingga peminjaman modal kepada pedagang input secara langsung dalam bentuk pupuk akan lebih praktis.

Dalam periode tiga tahun sumber pinjaman modal petani umumnya mengalami perubahan terutama pada tipe desa berbasis lahan kering. Pada desa lahan kering berbasis palawija sumber pinjaman modal yang dominan pada awalnya adalah pedagang sarana produksi (35% petani) dan sesama petani (35,0% petani), tetapi dalam tiga tahun kemudian bergeser menjadi kelompok tani (44,4% petani) dan koperasi (13,1% petani). Pada desa lahan kering berbasis palawija juga terjadi pergeseran dari pedagang sarana produksi (38,7% petani) dan sesama petani (19,4%) menjadi bank formal (63,6% petani) dan koperasi (18,2% petani). Begitu pula pada desa lahan kering berbasis perkebunan terjadi pergeseran yang mengarah pada dominasi koperasi (33,3% petani) dan bank formal (36,7%), sedangkan pada desa sawah berbasis padi sumber pinjaman modal yang dominan tetap pada pedagang sarana produksi dan sesama petani.

Perubahan sumber pinjaman modal petani pada desa lahan kering menunjukkan bahwa peran pedagang sarana produksi sebagai pemberi pinjaman modal kepada petani semakin lemah. Sebaliknya, peranan kelompok tani dan koperasi sebagai pemberi pinjaman modal petani cenderung meningkat. Hal ini kemungkinan terjadi akibat adanya program PUAP yang menyalurkan bantuan dana kepada kelompok tani/gapoktan sebagai modal awal untuk pembentukan lembaga keuangan yang dikelola petani. Dalam banyak kasus gapoktan/kelompok

tani penerima dana PUAP membentuk koperasi simpan pinjam sebagai upaya legitimasi untuk berperan sebagai lembaga keuangan.

Tabel 8. Sumber Peminjaman Modal oleh Petani Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Sumber pinjaman modal ³⁾								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tahun awal ¹⁾									
1. Lahan sawah-padi	48,2	10,2	10,2	0,7	13,9	4,4	7,3	1,5	3,6
2. Lahan kering-palawija	35,0	5,0	0,0	0,0	35,0	0,0	5,0	0,0	20,0
3. Lahan kering-sayuran	38,7	3,2	0,0	6,5	19,4	3,2	19,4	0,0	9,7
4. Lahan kering-perkebunan	36,5	9,6	1,9	1,9	9,6	0,0	32,7	1,9	5,8
Rata-rata	39,6	7,0	3,0	2,3	19,5	1,9	16,1	0,9	9,8
Tahun akhir ²⁾									
1. Lahan sawah-padi	40,2	2,3	0,0	1,1	24,1	0,0	9,2	1,1	21,8
2. Lahan kering-palawija	5,6	5,6	0,0	10,1	10,1	5,6	44,4	13,1	5,6
3. Lahan kering-sayuran	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	18,2	63,6
4. Lahan kering-perkebunan	3,3	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	6,7	33,3	36,7
Rata-rata	14,6	4,5	0,0	5,3	11,3	1,4	15,1	15,9	31,9
Perubahan									
1. Lahan sawah-padi	-8,0	-7,9	-10,2	0,4	10,2	-4,4	1,9	-0,4	18,2
2. Lahan kering-palawija	-29,4	0,6	0,0	10,1	-24,9	5,6	39,4	13,1	-14,4
3. Lahan kering-sayuran	-29,6	-3,2	0,0	2,6	-19,4	-3,2	-19,4	18,2	53,9
4. Lahan kering-perkebunan	-33,2	0,4	-1,9	-1,9	0,4	0,0	-26,0	31,4	30,9
Rata-rata	-25,0	-2,5	-3,0	3,0	-8,2	-0,5	-1,0	15,0	22,1

Keterangan:

¹⁾ Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

²⁾ Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

³⁾ Sumber pinjaman modal:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 = pedagang sarana produksi | 2 = pedagang hasil pertanian | 3 = penjual jasa alsintan |
| 4 = bank informal | 5 = sesama petani | 6 = melepas uang (rentenir) |
| 7 = kelompok tani | 8 = koperasi | 9 = bank formal |

KELEMBAGAAN PEMASARAN HASIL PANEN PETANI

Dengan luas penguasaan lahan garapan yang terbatas peningkatan produktivitas usaha tani merupakan upaya penting bagi peningkatan pendapatan petani. Pengalaman selama ini membuktikan hal tersebut di mana peningkatan pendapatan petani padi berlangsung secara paralel dengan peningkatan produktivitas usaha tani padi yang dirangsang oleh inovasi teknologi usaha tani padi. Namun, akhir-akhir ini upaya peningkatan produktivitas padi dan komoditas pertanian lainnya semakin sulit diwujudkan akibat langkanya terobosan teknologi usaha tani yang dapat meningkatkan produktivitas komoditas pertanian secara signifikan. Pada situasi demikian maka salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan petani padi adalah dengan mendorong petani untuk melakukan cara penjualan hasil panen petani yang dapat memberikan harga jual yang lebih menguntungkan.

Secara umum, terdapat dua cara penjualan hasil panen petani, yaitu (1) secara tebasan, ijon atau borongan; dan (b) per satuan unit produk yang dihasilkan. Penjualan hasil panen secara tebasan cenderung merugikan petani karena harga jual yang diperoleh petani biasanya lebih murah dibanding harga pasar yang berlaku akibat perilaku pedagang yang berusaha memaksimalkan keuntungannya. Dengan cara penjualan tebasan tersebut petani juga kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai tambah yang dapat diperoleh melalui penanganan pascapanen sesuai dengan kebutuhan konsumen. Akan tetapi, cukup banyak petani yang menjual hasil panennya secara tebasan atau ijon dan cara penjualan tersebut semakin banyak dilakukan oleh petani. Pada tahun awal penelitian sebanyak 15,3% petani menjual hasil panennya dengan cara tebasan atau ijon tetapi dalam periode tiga tahun kemudian naik menjadi 18,7% (Tabel 9). Meningkatnya cara penjualan tersebut terutama dilakukan oleh petani sayuran dan palawija, sedangkan pada petani padi dan petani perkebunan relatif tetap.

Tabel 9. Petani yang Mejual Hasil Panennya Secara Tebasan/Ijon dan Alasannya Menurut Tipe Desa, 2007-2012 (% Petani)

Tipe desa	Petani menjual tebasan	Alasan menjual tebasan/diborongkan			
		1	2	3	4
Tahun awal ¹⁾					
1. Lahan sawah-padi	18,8	37,5	41,7	8,3	12,5
2. Lahan kering-palawija	7,9	50,0	50,0	-	-
3. Lahan kering-sayuran	25,6	46,2	53,8	-	-
4. Lahan kering-perkebunan	8,9	89,3	3,6	3,6	3,6
Rata-rata	15,3	55,8	37,3	3,0	4,0
Tahun akhir ²⁾					
1. Lahan sawah-padi	15,9	43,8	28,1	11,2	7,9
2. Lahan kering-palawija	16,9	71,4	23,8	-	4,8
3. Lahan kering-sayuran	36,8	67,6	18,9	13,5	-
4. Lahan kering-perkebunan	5,1	77,8	11,1	11,1	-
Rata-rata	18,7	65,2	20,5	9,0	3,2
Perubahan					
1. Lahan sawah-padi	-2,9	6,3	-13,6	2,9	-4,6
2. Lahan kering-palawija	9,0	21,4	-26,2	0,0	4,8
3. Lahan kering-sayuran	11,2	21,4	-34,9	13,5	0,0
4. Lahan kering-perkebunan	-3,8	-11,5	7,5	7,5	-3,6
Rata-rata	3,4	9,4	-16,8	6,0	-0,8

Keterangan:

¹⁾ Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

²⁾ Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

³⁾ Alasan menjual tebasan/diborongkan:

1 = cepat dapat uang

2 = hemat tenaga kerja

3 = mengejar waktu tanam/waktu kerja berburuh

4 = ongkos panen/angkut mahal

Banyak alasan yang diungkapkan petani untuk memilih cara penjualan tebasan meskipun cara penjualan tersebut kurang menguntungkan petani. Namun, alasan yang paling kuat adalah cepat mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Pada tahun awal penelitian sebanyak 55,8% petani mengungkapkan alasan tersebut tetapi dalam periode tiga tahun kemudian naik menjadi 65,2%. Kenaikan tersebut cukup besar pada petani sayuran dan petani palawija, yaitu lebih dari 20%. Hal ini menunjukkan bahwa desakan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani semakin besar sehingga petani terpaksa menjual hasil panennya secara tebasan atau ijon.

Alasan lain yang cukup kuat adalah lebih hemat tenaga kerja. Akan tetapi, jumlah petani yang mengungkapkan alasan tersebut cenderung semakin sedikit, kecuali pada petani perkebunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menguatnya cara penjualan tebasan atau ijon yang dilakukan petani secara umum lebih disebabkan oleh desakan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bukan alasan lainnya. Dalam kaitan ini maka pengembangan lembaga keuangan yang dapat diakses petani secara mudah merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meringankan beban petani.

Petani pada umumnya menjual hasil panennya bukan secara tebasan tetapi per unit produk yang dihasilkan. Secara umum, terdapat lebih dari 80% petani yang memilih cara pemasaran tersebut dan menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul, pedagang besar, atau industri pengolahan. Sebagian besar petani (lebih dari 50% petani) menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul desa (Tabel 10). Alternatif cara pemasaran ini banyak dipilih petani karena transaksi penjualannya lebih praktis. Biasanya pedagang pengumpul desa membeli hasil panen petani di lahan petani atau mendatangi rumah petani. Kelompok pedagang tersebut umumnya adalah pedagang-pedagang kecil dan mereka lebih aktif mencari petani yang akan menjual hasil panennya dibanding kelompok pedagang lainnya.

Dalam periode tiga tahun pola pemasaran komoditas pertanian yang dihasilkan petani cenderung berubah. Meskipun penjualan kepada pedagang pengumpul desa tetap merupakan yang dominan, tetapi penjualan kepada alternatif pedagang lainnya mengalami perubahan. Pada desa lahan sawah berbasis padi, peran penggilingan padi yang pada awalnya relatif besar (17,8%) dalam membeli padi yang dihasilkan petani cenderung turun (1,7%) dan digantikan oleh pedagang besar di tingkat desa dan kecamatan. Perubahan pola pemasaran yang mengarah kepada pedagang besar dan industri pengolahan juga terjadi pada desa lahan kering berbasis sayuran dan perkebunan.

Tabel 10. Pola Pemasaran Hasil Panen Petani Menurut Kategori Pedagang Pembeli Menurut Tipe Desa, 2007–2012 (% Petani)

Tipe desa	Kategori pembeli hasil panen petani				
	1	2	3	4	5
Tahun awal ¹⁾					
1. Lahan sawah-padi	72,8	17,8	5,8	1,1	2,5
2. Lahan kering-palawija	70,7	3,0	4,5	17,3	4,5
3. Lahan kering-sayuran	58,6	2,9	21,4	2,9	14,3
4. Lahan kering-perkebunan	63,5	1,8	10,8	18,6	5,4
Rata-rata	66,4	6,4	10,6	10,0	6,7
Tahun akhir ²⁾					
1. Lahan sawah-padi	74,5	1,7	14,9	7,6	1,3
2. Lahan kering-palawija	82,5	0,0	3,2	12,7	1,6
3. Lahan kering-sayuran	53,5	2,8	38,0	2,8	2,8
4. Lahan kering-perkebunan	61,0	6,0	2,2	20,9	9,9
Rata-rata	67,9	2,6	14,6	11,0	3,9
Perubahan					
1. Lahan sawah-padi	1,7	-16,1	9,1	6,5	-1,2
2. Lahan kering-palawija	11,8	-3,0	-1,3	-4,6	-2,9
3. Lahan kering-sayuran	-5,1	-0,1	16,6	-0,1	-11,5
4. Lahan kering-perkebunan	-2,5	4,2	-8,6	2,3	4,5
Rata-rata	1,5	-3,8	4,0	1,0	-2,8

Keterangan:

¹⁾ Tahun awal: 2007 (LS-padi); 2008 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2009 (LK-perkebunan)

²⁾ Tahun akhir: 2010 (LS-padi); 2011 (LK-palawija dan LK-sayuran); 2012 (LK-perkebunan)

³⁾ Kategori pembeli hasil panen petani:

1 = pedagang pengumpul desa

2 = industri pengolahan

3 = pedagang besar desa

4 = pedagang besar kecamatan

5 = pedagang besar kabupaten

KESIMPULAN

Sarana produksi yang dibutuhkan petani umumnya selalu tersedia, namun karena keterbatasan modal yang dimiliki tidak seluruh petani mampu membeli sarana produksi yang dibutuhkan secara tunai. Hal ini terutama terjadi pada pembelian pupuk dimana sekitar 12–20% petani terpaksa membeli pupuk dari pedagang saprodi dengan cara meminjam dan dibayar setelah panen meskipun harga beli pupuk menjadi lebih mahal dibanding harga pasar. Akan tetapi, pembelian pupuk dengan cara tersebut cenderung turun di desa sawah berbasis padi dan desa sayuran dan hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas petani secara finansial terhadap pupuk cenderung membaik. Sebaliknya, di desa berbasis tanaman perkebunan semakin banyak petani membeli pupuk dengan cara dibayar setelah panen dan hal ini dapat terjadi karena harga pupuk yang semakin mahal akibat tidak adanya alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan.

Keterbatasan modal usaha tani merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh sebagian petani dan sekitar 23% petani meminjam modal dari pihak lain terutama untuk membiayai kebutuhan pupuk dan obat-obatan. Namun, dalam periode tiga tahun proporsi petani peminjam modal tersebut turun menjadi 15% petani. Penurunan tersebut terjadi pada semua tipe desa dan penurunan yang cukup besar terjadi pada desa sawah berbasis padi dan desa lahan kering berbasis sayuran. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan modal petani padi dan petani sayuran cenderung meningkat.

Sejalan dengan turunnya jumlah petani peminjam modal juga telah terjadi pergeseran sumber pinjaman modal yang biasa dimanfaatkan petani, yaitu dari pedagang sarana produksi menjadi koperasi dan bank formal. Namun, perlu dicatat bahwa lembaga koperasi tersebut umumnya bukan merupakan lembaga koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh petani tetapi merupakan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang memiliki status hukum sebagai koperasi. Begitu pula bank formal yang semakin banyak dimanfaatkan petani sebagai sumber pinjaman modal umumnya adalah BPR yang biasanya memberlakukan suku bunga pinjaman lebih besar dibanding lembaga bank umum.

Dengan luas penguasaan lahan relatif sempit dan peluang peningkatan produktivitas yang semakin terbatas maka dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha tani para petani perlu didorong untuk melakukan cara pemasaran hasil panen yang dapat memberikan harga jual lebih menguntungkan. Secara umum terdapat dua cara pemasaran hasil panen petani, yaitu (1) secara tebasan, ijon atau borongan; dan (b) per satuan unit produk yang dihasilkan. Penjualan hasil panen secara tebasan cenderung merugikan petani karena harga jual yang diperoleh petani biasanya lebih murah dibanding harga pasar akibat perilaku pedagang yang berusaha memaksimumkan keuntungannya. Namun, karena desakan kebutuhan uang tunai cukup banyak petani yang menjual hasil panennya secara tebasan atau ijon dan cara penjualan tersebut cenderung meningkat, yaitu dari 15,3% petani menjadi 18,7% petani.

Dalam konteks alih teknologi, Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memiliki peranan penting untuk mempercepat proses alih teknologi kepada petani, namun peranan tersebut belum berlangsung secara optimal akibat kurangnya interaksi antara PPL dan petani sehingga petani lebih mengandalkan petani lain yang berpengalaman sebagai sumber informasi teknologi. Dalam kaitan tersebut maka pemberdayaan petani berpengalaman yang diposisikan sebagai "Penyuluh Swadaya" perlu dikembangkan di samping meningkatkan kunjungan petugas PPL kepada petani. Keterlibatan pedagang dan kios sarana produksi yang diposisikan sebagai "Penyuluh Swasta" juga perlu dikembangkan mengingat interaksi antara petani dengan pedagang sarana produksi relatif intensif. Dalam kaitan ini maka pembinaan teknologi pertanian seyogianya tidak hanya melibatkan petani tetapi melibatkan pula para pedagang sarana produksi agar mereka dapat meneruskan informasi teknologi yang diperoleh kepada para petani.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh sebagian petani berlahan sempit adalah keterbatasan modal tunai dan hal ini menyebabkan petani dirugikan dari dua sisi karena (a) petani terpaksa membeli pupuk dan sarana produksi lain yang

dibutuhkan dengan cara pembayaran setelah panen meskipun harganya lebih mahal dibanding harga pasar; dan (b) petani terpaksa menjual hasil panennya secara tebasan atau ijon meskipun harga yang diterima petani lebih murah dibanding harga pasar dan petani kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai tambah melalui kegiatan pasca panen. Untuk memperkecil permasalahan tersebut maka perlu dikembangkan lembaga permodalan yang dikelola oleh para petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Beierlein J.G. 1986. Principles of Agribusiness Management. A Reston Book. Prentice-Hall. New Jersey.
- Binswanger, H.P. and V.W. Ruttan. 1978, Induced Innovation: Technology, Institutions and Development. The Johns Hopkins University Press. Baltimore.
- Cramer G.L. and C.W. Jensen. 1994. Agricultural Economics and Agribusiness. John Wiley & Sons Inc. New York.
- Downey W.D. dan S.P. Ericson. 1992. Manajemen Agribusiness. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Fowler, A. 1992. Prioritizing Institutional Development: A New Role for NGO Centres for Study and Development. Sustainable Agriculture Programme. Gatekeeper Series SA31. IIED. London.
- Kloppinger-Todd, R. and M. Sharma. 2010. Innovations in Rural and Agriculture Finance, Overview. For Food, Agriculture, and the Environment Focus 18. Brief 1. July 2010.
- Pakpahan, A. 1989. Perspektif Ekonomi Institusi dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Ekonomi dan Keuangan Indonesia 37(4):445-464.
- Ruttan, V.W. and Y. Hayami. 1984. Toward a Theory of Induced Institutional Innovation. Center for Economic Research, Department of Economics, University of Minnesota. Minneapolis, Minnesota.
- Suradisastra, K. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. Forum Agro Ekonomi, 26(2):82-91.
- Soentoro, Supriyati, E. Jamal. 1992. Sejarah Perkreditan Pertanian Subsektor Tanaman Pangan. hlm. 6-62. *Dalam* A.H. Taryoto, A. Mintoro, Soentoro, Hermanto. Perkembangan Perkreditan Pertanian di Indonesia. Monograph Series No. 3. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Uphoff, N. 1992. Local Institutions and Participation for Sustainable Development. Gatekeeper Series SA31. IIED. London.